



## **LKjIP BPPKAD TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 disusun sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, semoga LKjIP ini dapat bermanfaat.

**Banjarnegara, Januari 2018**

**Kepala Badan Pengelolaan  
Pendapatan, Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Banjarnegara**

**Drs. INDARTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651003 198607 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahunan.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
B. Realisasi Keuangan .....	23
BAB IV PENUTUP .....	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Data Capaian Kinerja	
2. Rencana Kerja Tahunan	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DATA UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPPKAD Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4. Pelaksanaan kebijakan selaku Bendahara Umum Daerah;
5. Pembinaan dan fasilitasi dibidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

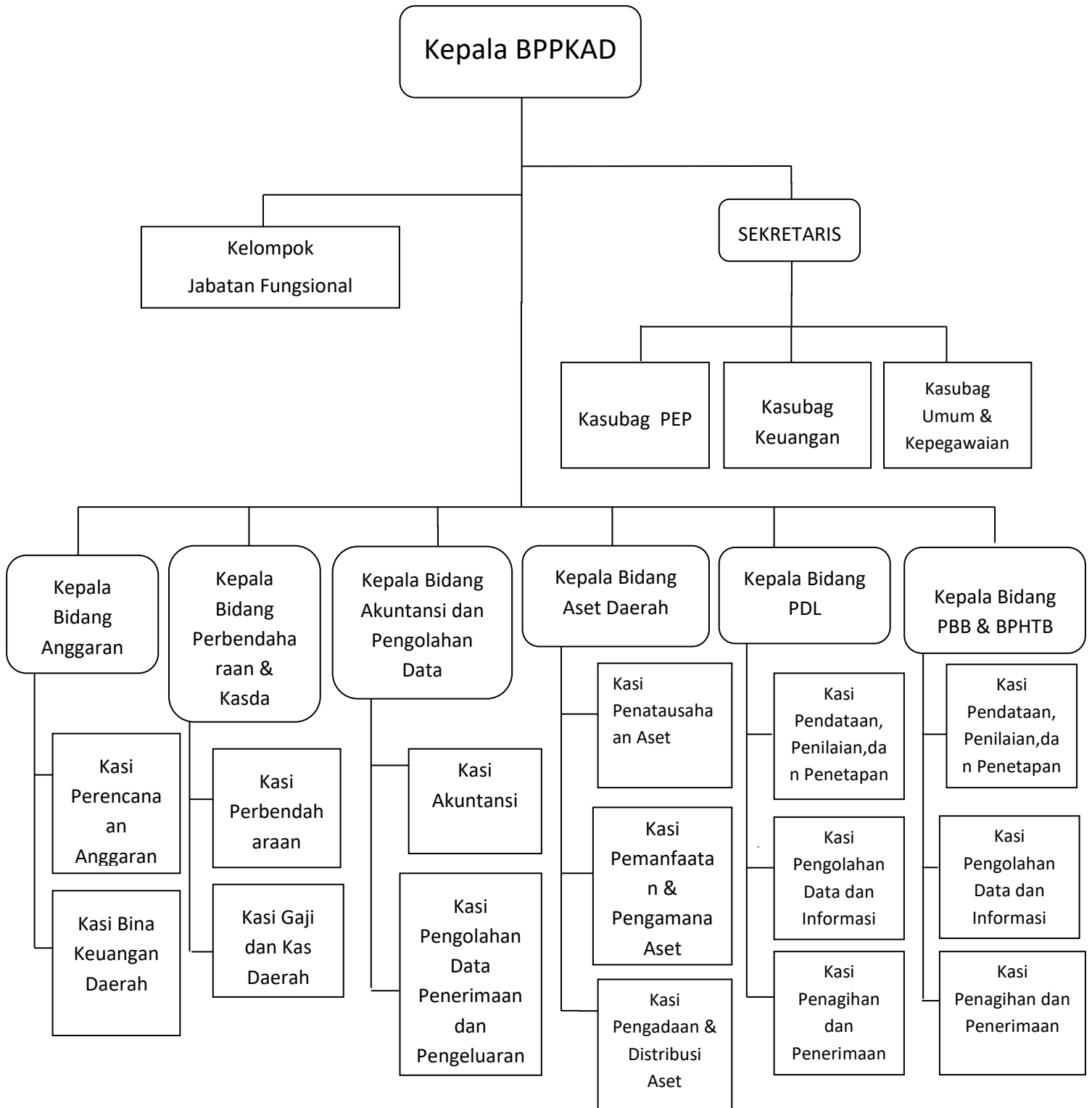
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
8. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah membawahi :

1. Sekretariat;
2. Bidang Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
4. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data;
5. Bidang Aset Daerah;
6. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
7. Bidang PBB dan BPHTB; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

# STRUKTUR ORGANISASI BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA



Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 sebanyak 97 orang yaitu : PNS 69 orang, PTT 6 orang dan 22 orang THL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1:  
JUMLAH PEGAWAI  
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN, DAN JENJANG PENDIDIKAN  
BPPKAD KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2017

No	Uraian	PNS		PTT		THL	
		L	P	L	P	L	P
I	Berdasarkan Golongan :	48	21	3	3	17	5
	1. Golongan IV	6	2	0	0	0	0
	2. Golongan III	22	16	0	0	0	0
	3. Golongan II	17	3	0	0	0	0
	4. Golongan I	3	0	0	0	0	0
II	Berdasarkan Pendidikan	48	21	3	3	17	5
	1. Pasca Sarjana	4	0	0	0	0	0
	2. Sarjana	20	18	2	1	2	2
	3. Sarjana Muda	2	0	0	0	1	0
	4. SLTA	17	3	1	2	13	3
	5. SMP	2	0	0	0	1	0
	6. SD	3	0	0	0	0	0

## B. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI

Bahwa dalam era otonomi daerah, daerah dituntut kemandiriannya untuk dapat membiayai tugas-tugas pemerintahan baik tugas dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan. Sesuai tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka sangat berperan penting di dalam upaya meningkatkan kemandirian

daerah. Mengingat pentingnya pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan, daerah harus mampu mengelola sumber pendapatan daerah dengan mengerahkan segala sumber daya, sarana dan prasarana yang ada.

Adapun isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

**1. Rasio PAD terhadap pendapatan masih rendah ( dibawah 25 % dari total pendapatan )**

Apabila kita cermati dalam struktur APBD maka akan terlihat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari rasio PAD terhadap Pendapatan masih berkisar pada 10–13 % setiap tahunnya. Walaupun penerimaan PAD selalu mengalami peningkatan setiap tahun tetapi karena penerimaan dana perimbangan juga mengalami peningkatan maka rasio PAD terhadap pendapatan hanya berkisar pada 10-13 % saja.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selalu mengupayakan peningkatan ratio PAD terhadap pendapatan dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pada jenis-jenis PAD. Apalagi dengan terbitnya Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan ada penambahan untuk jenis pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah, PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah yang diberlakukan paling lambat pada tahun 2014.

**2. Laporan Keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.**

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara setiap berakhirnya pelaksanaan APBD selalu menyusun laporan keuangan daerah. Hal ini merupakan kewajiban sesuai aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006. Laporan keuangan daerah ini sebelum disampaikan kepada DPRD diperiksa/diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa



Keuangan – Republik Indonesia ( BPK-RI) untuk dapat diyakini kewajarannya dengan memberikan opini terhadap laporan keuangan daerah dimaksud. Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia ( BPK-RI) telah memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan aset daerah bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah melalui kegiatan Sensus Barang, dilakukan secara intensif untuk membenahan bidang aset. Usaha keras ini dapat terbukti dengan diraihnya opini “Wajar Tanpa Pengecualian” empat tahun berturut turut yaitu atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016. Guna mempertahankan opini ini, maka BPPKAD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah secara intensif mengadakan klinik rekonsialisasi aset dengan OPD dalam upaya membenahan aset masing-masing OPD sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan dapat dipertahankan kelima kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2017 dan seterusnya.

**3. Kurangnya pemahaman para pengelola keuangan/barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap tugas pokok dan fungsinya.**

Masih banyak pengelola keuangan/barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memahami akan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan/barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakibatkan penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga terlambat. Disamping itu terlambatnya

penyusunan laporan keuangan/barang juga disebabkan seringnya mutasi jabatan fungsional umum yang penempatannya belum tentu sesuai dengan jabatan yang sudah ditetapkan. Sehingga petugas akuntansi atau pengurus barang selalu berganti personil baru yang tentunya harus dilatih terlebih dahulu.

4. **Kurangnya kemampuan/pengetahuan/keahlian sumber daya manusia di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.**

Kemampuan/pengetahuan/keahlian sumber daya manusia di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sudah memadai, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Regulasi di bidang pendapatan, keuangan dan aset selalu mengalami perubahan sehingga semua pegawai di BPPKAD dituntut untuk selalu mengikuti perubahan tersebut.

5. **Kurangnya tenaga IT di BPPKAD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.**

BPPKAD selain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk mendukung penatausahaan pengelolaan keuangan daerah agar mudah dalam pengelolaannya maka dilakukan dengan sistem informasi manajemen (SIM), namun karena kurangnya tenaga yang menguasai teknologi informasi yang memadai mengakibatkan BPPKAD masih sangat tergantung kepada pihak ketiga dalam mengelola suatu sistem informasi yang ada

6. **Kurangnya sumber daya manusia di BPPKAD.**

Mengingat fungsi BPPKAD sebagai OPD dan juga SKPKD maka beban kerja yang ada dibandingkan dengan jumlah personil yang ada masih dirasakan sangat kurang. Jumlah pegawai DPPKAD sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah 69 PNS, 6 PTT, dan 24 THL. Hal ini tidak sebanding dengan tugas pokok dan fungsi

BPPKAD sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Kondisi ini dapat berakibat pekerjaan tidak dapat optimal.

## **7. Terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.**

Dengan terbitnya PP no 71 tahun 2010 sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, metode akuntansi yang digunakan dari basis Kas menuju Akrua sangat dibutuhkan kesiapan pelaksanaannya baik dari aturan pendukungnya dan terutama SDM yang menanganinya. Oleh karena itu petugas akuntansi dari setiap OPD mendapat pelatihan dan pendampingan dari Tim Kabupaten dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan.

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
  - A. Data Umum Organisasi
  - B. Landasan Hukum
  - C. Aspek Stratejik Organisasi serta Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
  - D. Sistematika Penulisan
- II. PERENCANAAN KINERJA
  - A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahunan
- III. AKUNTABILITAS KINERJA
  - A. Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 dengan melakukan analisis Capaian Kinerja sbb:
    1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama lima tahun yaitu Tahun 2017 dengan Tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra BPPKAD Kab. Banjarnegara.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

### IV. PENUTUP

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Analisis capaian kinerja dan anggaran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RINGKASAN /IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN YANG BERSANGKUTAN**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2017-2022, maka BPPKAD menyusun rencana strategik Tahun 2017-2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Namun karena Tahun 2017 merupakan Tahun transisi antara RPJMD Lama Tahun 2011-2016 dan RPJMD Baru 2017-2022 yang ditetapkan pada bulan Desember 2017 sehingga Renstra OPD menjadi Renstra Tahun 2018-2022, oleh karena itu sebagai acuan analisis pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tahun 2017.

Rencana Strategik Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan perundang-undangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) termasuk pembinaan terhadap ahlak dan perilaku aparatur daerah serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, maka BPPKAD mendukung untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara yang menjadi visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu :

“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi :

Misi-misi Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 4) **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.**
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah BPPKAD mendukung **pencapaian misi ke 4.**

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas ditetapkan tujuan, sasaran dan program sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2:

**TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM  
BPPKAD KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1	2	3	4
1.	<b>Peningkatan pengelolaan aset daerah yang profesional.</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional.</b>	<b>Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.</b>
			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>
			<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.</b>
2.	<b>Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan transparan.</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.</b>
			<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>
			<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>

3.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	Meningkatnya pendapatan asli daerah.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Peningkatan
----	-------------------------------------	--------------------------------------	--

Sumber : Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2017

Setiap sasaran stratejik Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara diuraikan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, BPPKAD menetapkan Rencana Kinerja yang dicapai melalui 3 sasaran, yang didukung 9 program dan 44 kegiatan. Adapun alokasi anggaran pada APBD Tahun 2017 BPPKAD mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp. **52.795.443,-** terdiri dari **Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.624.206.000,-** dan **Belanja Langsung sebesar Rp. 45.171.237.000,-**

Adapun Sasaran Pertama pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah “Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase hak kepemilikan tanah Pemda yang bersertifikat dengan target 37,13% yang keseluruhannya didukung 3 (tiga) Program dan 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran Rp. 2.613.230.000,-

Sasaran kedua “Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel” dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Prosentase Penyerapan APBD dengan target 88,00%, 2) Opini Laporan Keuangan Daerah dengan target WTP yang keseluruhannya didukung 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan total anggaran Rp. 2.856.253.000,-

Sedangkan sasaran ketiga “Meningkatnya pendapatan asli daerah diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 1) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah yang keseluruhannya didukung 1 (satu) Program dan



8 (delapan) kegiatan dengan target 12,77% dengan total anggaran Rp.4.230.245.000,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya yang diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3:

PERBANDINGAN ANTARA TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN DENGAN REALISASI TAHUN 2017 BPPKAD KAB. BANJARNEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional	Persentase hak kepemilikan tanah pemda	37,13%	29,51 %  388 bidang dg catatan : setelah dilaksanakan sensus barang daerah pada Tahun 2017 jumlah tanah Pemkab yg bersertifikat 388 bidang ( 379 sertifikat lama dan 9 bidang sertifikat baru realisasi 2017) . Total tanah Pemkab 1.315 Bidang.	79,48%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Prosentase Penyerapan APBD	88,00	92,52	105,14%
		Opini laporan keuangan daerah	WTP	NA	Proses
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,77%	13,72%	107,44
			PAD (APBD Perub) = 277.400.917.500,- PENDAPATAN = 2.172.223.792.000,-	PAD = 297.466.264.976,- PENDAPATAN : 2.167.782.044.463,-	

Dari tabel di atas hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja adalah 97,35%. Secara rinci seluruh sasaran sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4:  
HASIL CAPAIAN SASARAN BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2017

NO	SASARAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional	79.48%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1. 105,14% 2. NA
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah	107,44%
	RATA-RATA	97,35%

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini (2017) dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 5:  
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017  
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2017	CAPAIAN KINERJA					KET
			2017	2016	2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Persentase hak kepemilikan tanah pemda	37,13 %	<b>29, 51%</b> <b>388 bidang dari target keseluruhan 1.315 bidang</b>	73,50% 391 bidang dari target 5 th 532 bidang	71,80% 382 bidang dari target 5 th 532 bidang	71,24 % 379 bidang dari target 5 th 532 bidang	70,11% 373 bidang dari target 5 th 532 bidang	

3	Prosentase Penyerapan APBD	88,00	92,52 <u>2.178.823.342.905</u> 2.355.088.391.000	89,56 <u>2.017.382.964.152</u> 2.252.497.097.900	82,26 <u>1.612.219.383.362</u> 1.959.994.218.000	84,49 <u>1.349.769.030.982</u> 1.597.580.830.000	83,64 <u>1.175.474.028.855</u> <u>1.405.366.623.000</u>	
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	12,77	13,72 <u>297.466.264.976</u> 2.167.782.044.463	12,04 <u>221.048.387.512</u> 1.836.015.079.137	10,65 <u>180.320.832.983</u> 1.693.263.422.460	11,52 <u>161.652.537.773</u> 1.403.398.262.639	7,73 <u>98.975.318.350</u> 1.279.702.465.966	Thn. 2014 PBB P2 diserahkan ke Pemda

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra BPPKAD.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 7:  
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA DPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN KINERJA					REALISASI s/d 2017	KEPERANGKIPAN
			2017	2016	2015	2014	2013	(4+5+6+7+8)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase hak kepemilikan tanah pemda	37,13 %	29,51% 388 bidang dari target keseluruhan 1.315 bidang	73,50% 391 bidang dari target 5 th 532 bidang (Jumlah tanah Pemkab seluruh 1.080 Bidang)	71,80% 382 bidang dari target 5 th 532 bidang	71,24 % 379 bidang dari target 5 th 532 bidang	70,11% 373 bidang dari target 5 th 532 bidang	63,23	

2	Prosentase Penyerapan PAD	<b>88,00</b>	92,52 <u>2.178.823.342.905</u> 2.355.088.391.000	89,56 <u>2.017.382.964.152</u> 2.252.497.097.900	82,26 <u>1.612.219.383.363</u> 1.959.994.218.000	84,49 <u>1.349.769.030.982</u> <u>1.597.580.830.000</u>	83,64 <u>1.175.474.028.855</u> 1.405.366.623.000	86,49	Terca pa
		<b>WTP</b>	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
16	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	<b>12,77</b>	13,72 <u>297.466.264.976</u> 2.167.782.044.463	12,04 <u>221.042.460.099</u> 1.836.039.151.724	10,65 <u>180.320.832.983</u> 1.693.263.422.460	11,52 <u>161.652.537.773</u> 1.403.398.262.639	7,73 <u>98.975.318.350</u> 1.279.702.465.966	11,13	Terca pai
		<b>PK</b>							

#### 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

##### Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional

Sasaran 1 ini dapat diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN KINERJA					REALISASI s/d 2017	KETERANGAN
			2017	2016	2015	2014	2013	(4+5+6+7+8)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase hak kepemilikan tanah pemda	100% 10 bidang	29,51% 388 bidang dari target keseluruhan 1.315 bidang	73,50% 391 bidang dari target 5 th 532 bidang (target RPJMD)	71,80% 382 bidang dari target 5 th 532 bidang	71,24 % 379 bidang dari target 5 th 532 bidang	70,11% 373 bidang dari target 5 th 532 bidang	63,23%	Penghitungan persentase berubah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tanah yg dimiliki Pemkab

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program yaitu : 1) Program Peningkatan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun indikator kinerja sasaran “ Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional

adalah “Tersedianya laporan aset yang mendukung laporan neraca” dan “Persentase hak kepemilikan tanah Pemkab yang bersertifikat” dicapai melalui 4 kegiatan dengan output berupa :

- a. Tersedianya laporan aset yang mendukung neraca yaitu dokumen laporan Barang Milik Daerah.
- b. Jumlah dan jenis asuransi yaitu sebanyak 4 paket asuransi berupa : asuransi kendaraan paket I sebanyak 55 unit dan paket II sebanyak 55 unit, pasar sebanyak 25 unit, dan paket gedung pemerintah sebanyak 61 gedung.
- c. Jumlah bidang tanah Pemkab yang dilelang yaitu tanah eks. bengkok sebanyak 11 kelurahan atau 159 bidang dan Tanah Desa Sumberejo 47 bidang.
- d. Persentase hak kepemilikan tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat sebesar 29,51% atau 388 bidang tanah dari 1.315 bidang tanah milik Pemkab. Pada Tahun 2016 aset tanah SMA dan SMK Negeri diserahkan ke Provinsi hal ini berakibat berkurangnya jumlah aset tanah yang sudah bersertifikat.

Capaian kinerja yang belum memuaskan untuk pensertifikatan tanah tersebut di atas disebabkan pada kegiatan pensertifikatan tanah tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten saja namun juga sangat tergantung dari berbagai pihak terkait, terutama Desa/Kelurahan dalam penyediaan kelengkapan dokumen dan Badan Pertanahan Nasional yang dibatasi kuota. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara koordinasi secara intens dengan pihak yang terkait.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel**

Sasaran 2 ini dapat diukur melalui dua indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN KINERJA					REALISASI s/d 2016	KETERANGAN
			2017	2016	2015	2014	2013	(4+5+6+7+8)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase penyerapan APBD	88,00	92,52%	89,56	82,26	84,49	83,64	86,49	
2	Opini laporan keuangan daerah	WTP	Dalam Proses	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai 4 tahun berurutan yaitu : di thn 2014 atas audit LKD 2013, 2015 atas audit LKD Tahun 2014, 2016 atas audit LKD Tahun 201 dan Tahun 2017 atas audit 2016.

Sasaran ini dicapai melalui 4 (dua) program yaitu : 1)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah , 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dengan 13 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran “Prosentase Penyerapan APBD”, dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sasaran “Opini Laporan Keuangan Daerah” dicapai dengan 3 Program yaitu : 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ,2) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dan 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi dengan 16 kegiatan yang outputnya berupa :

- a. Tersusunnya Laporan Survey kepuasan masyarakat.
- b. Tersusunnya 6 dokumen laporan kinerja OPD yaitu :
  - 1) LKPJ/LPPD/EKPD
  - 2) Laporan POK
  - 3) LKjIP
  - 4) PK dan Laporan Pengukuran Kinerja per Tri Wulan
  - 5) Laporan Aset OPD
  - 6) Laporan Keuangan OPD
- c. Tersusunnya Laporan Semesteran (4 dokumen : Laporan Keuangan (Laporan TW I, Laporan TW II, Laporan TW III, Neraca Semester I)
- d. Tersusunnya 1 dokumen standar satuan harga
- e. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD (dokumen pertanggungjawaban APBD).
- f. Tersedianya data gaji pegawai se kabupaten selama satu tahun.
- g. Tersedianya data kasda secara cepat dan akurat selama satu tahun.
- h. Tersusunnya 195 RKA OPD/Unit Kerja sesuai dengan berpedoman penyusunan APBD.
- i. Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dengan target IKM 71,92%.
- j. Tersusunnya 12 dokumen APBD (murni) dan Perubahan APBD tepat waktu
  - 1) Nota Keuangan dan Pengantar
  - 2) Nota Persetujuan DPRD
  - 3) Buku Perangkaan
  - 4) Perda APBD
  - 5) Perbup APBD
  - 6) Penjabaran APBD
- k. Terkoordinasinya 195 OPD/unit kerja penyedia data penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.
- l. Terkoordinasinya 195 OPD/unit kerja tertib administrasi keuangan daerah melalui program aplikasi SIMDA.
- m. terselesaikannya 5 kasus TPTGR.



- n. Terbinanya 195 OPD/unit kerja memahami administrasi pelaporan pelaksanaan APBD.
- o. Jumlah Peraturan Bupati yang tersusun
- p. Pengembangan WEB SITE OPD
- q. Terlatihnya pegawai BPPKAD sebanyak 46 orang.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini dicapai melalui 1 program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Indikator :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	CAPAIAN KINERJA					REALISASI s/d 2016	KETERANGAN
			2017	2016	2015	2014	2013	(4+5+6+7+8)/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	12,77 PK	13,72 $\frac{297.466.264.976}{2.167.782.044.463}$	12,04 $\frac{221.048.387.512}{1.836.015.079.137}$	10,65 $\frac{180.320.832.983}{1.693.263.422.460}$	11,52 $\frac{161.652.537.773}{1.403.398.262.639}$	7,73 $\frac{98.975.318.}{1.279.702.465.966}$	11,13	Tercapai

Sasaran ini dicapai melalui 2 program yaitu 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator kinerja sasaran “Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah” dengan target 12,77% dicapai melalui 10 kegiatan dengan output berupa :

- a. Tercapainya PAD 107,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 277,400 M terealisasi sebesar 297,466 M .
- b. Termonitornya Perangkat Daerah pengelola pendapatan.
- c. Termutakhirnya objek pajak PBB sebesar 17.946 dari target 14.617 objek pajak.

- d. Meningkatnya pendapatan dari PBB P2 sebesar Rp. 19,148 M dari target Rp. 18,450M (103,78% ) dan BPHTB sebesar Rp. 3,187 M,- dari target Rp. 2,500 M (127.48%).
- e. Termutakhirnya data potensi obyek pajak (PBB) sebanyak 35.250 OP dari target 35.000 OP.
- f. Tersedianya Data Potensi obyek pajak Pendapatan lainnya (9 pajak) dan terdatanya 5.000 OP dari target 2.400 OP.
- g. Tersedianya dokumen data pendapatan daerah lainnya.
- h. Terwujudnya data PPJ/PJU sebanyak 10 Kecamatan.
- i. Terwujudnya data piutang pajak yang diverifikasi sebanyak 1 WP dari target 22 WP. Hal ini disebabkan WP lainnya sudah sadar pajak sebelum sampai diverifikasi.
- j. Terlatihnya 22 orang pemeriksa pajak dan 19 orang pengelola Simpatda

Capaian kinerja yang berhasil memuaskan tersebut di atas disebabkan antara lain :

- a. Upaya kerja keras aparat pengelola pendapatan dari OPD pengelola pendapatan dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- b. Pada Tahun 2017 BOS Pusat masuk menjadi komponen pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 86.721.601.986,- atau berkontribusi sebesar 31,26% pada PAD. Sedangkan kontribusi pada Pendapatan Keseluruhan sebesar 3,99%.
- c. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 432.065.000,- pada kegiatan yaitu :1) Optimalisasi Pendapatan Daerah Lainnya Rp. 10.000.000,- 2) Pengelolaan Benda Berharga Rp.30.000.000,- 3) Intensifikasi PBB dan BPHTB Rp. 265.490.000,- 4) Pengelolaan Database PBB Rp. 28.975.000,-5) Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah (SIMPATDA) Rp. 97.000.000,-.

## B. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 Belanja Langsung mendapat anggaran sebesar Rp 45.171.237.014 pada APBD Perubahan. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.39.285.461.236,- atau sebesar 86,97% dengan rincian sebagai berikut :

### RINCIAN ANGGARAN PER PROGRAM

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.230.245.000	3.611.909.488	85,38%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83.000.000	68.022.500	81,95%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.029.559.000	2.714.458.875	89,60%
		Peningkatan Pengembangan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.000.000	107.905.990	98,10%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	210.000.000	178.540.025	84,94%
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	72.470.000	38.072.329	52,54%
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	76.000.000	71.389.586	93,93%
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.635.157.000	17.111.582.593	97,03%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.020.016.014	12.923.675.866	80,67%
3	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang profesional	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	263.230.000	204.892.140	77,84%
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.450.000.000	1.331.047.522	91,80%
		Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	900.000.000.	871.419.111	96,82%

Dalam hal realisasi anggaran, LKjIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi yaitu standar analisis biaya

belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Adapun secara lebih rinci per kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Adapun pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan untuk kegiatan dengan realisasi kurang dari 50% antara lain sebagai berikut:

### **1. Realisasi Program dan Kegiatan**

#### 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

##### a. Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

Anggaran : Rp. 1.091.360.000,00

Realisasi Keuangan : Rp. 11.918.211 (1,09%)

Realisasi Fisik : 35,00%

Permasalahan : Realisasi anggaran hanya 1,09% karena kegiatan pengadaan pakaian dinas mengalami gagal lelang. Hal ini disebabkan peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis. Sedangkan waktu untuk pengadaan sudah tidak mencukupi bila diadakan lelang kembali.

Solusi : Kegiatan pengadaan pakaian beserta kelengkapannya tidak diluncurkan di Tahun 2018 karena Desa bisa pengadaan sendiri.

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 merupakan laporan rutin yang kami susun dengan tujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan BPPKAD dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. LKjIP sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan BPPKAD dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapai. Bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban yang kami laporkan ini tidak lepas dari kerja keras dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang kita inginkan.

Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 secara umum telah berhasil dilaksanakan. Secara garis besar beberapa catatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017 adalah :

#### A. KEBERHASILAN

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih kembali yang keempat kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 atas audit BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2016.
2. Pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada **ketepatan** waktu Penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
3. Pengelolaan pendapatan daerah cukup berhasil hal ini dapat dilihat pada meningkatnya PAD dan ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah. Namun hal ini perlu terus ditingkatkan agar kemandirian daerah semakin tinggi dan makin luasnya kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

## B. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Kepatuhan wajib pajak dan masyarakat terhadap pemenuhan pembayaran pajak masih perlu ditingkatkan belum sepenuhnya sadar dengan sendirinya untuk memenuhi kewajiban. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan sosialisasi secara intensif baik melalui media (radio, leaflet, banner) maupun sosialisasi secara langsung pada wajib pajak. Disamping itu juga perlunya penerapan sanksi yang tegas pada wajib pajak yang tidak patuh.
2. Pengelolaan aset daerah terutama untuk pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 baru terselesaikan 29,51% atau 388 bidang tanah dari 1.315 bidang tanah milik Pemkab keseluruhan. Pada Tahun 2017 sertifikat yang dapat diterbitkan sejumlah 9 bidang :
  - 1) 2 bidang untuk perluasan Stadion Pemkab Banjarnegara dengan luas 998 m<sup>2</sup> dan 1.440 m<sup>2</sup>.
  - 2) 1 bidang Jalan Jagapati-Pasar Salak luas 413 m<sup>2</sup>
  - 3) 3 bidang lahan parkir 7 obyek wisata Giritirta luas 307m<sup>2</sup>, 484m<sup>2</sup> dan 1.280m<sup>2</sup>
  - 4) 2 bidang lahan parkir candi arjuna : 720m<sup>2</sup> dan 909m<sup>2</sup>.
  - 5) Perluasan pasar kota sebelah timur luas 2.375m<sup>2</sup>.
3. Permasalahan penyelesaian sertifikat tanah Pemkab sangat tergantung dari berbagai pihak yang terkait terutama Desa/Kelurahan dalam penyiapan kelengkapan dokumen dan Badan Pertanahan Nasional yang dibatasi kuota. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara koordinasi secara intens dengan pihak yang terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, semoga LKjIP tahun 2017 ini dapat memenuhi harapan sekaligus sebagai umpan balik bagi semua pihak yang berkepentingan. LKjIP ini tentunya memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran yang positif sangat kami harapkan.

Banjarnegara, Januari 2018  
KEPALA BPPKAD  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Drs. INDARTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19651003 198607 1 001

# LAMP IRAN